



### **Hak cipta dan penggunaan kembali:**

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

### **Copyright and reuse:**

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

#### 2.1. Universitas Multimedia Nusantara (UMN)

##### 2.1.1 Sejarah Singkat Universitas Multimedia Nusantara (UMN)

Sejarah Universitas Multimedia Nusantara (UMN) yang terdapat di [www.umn.ac.id](http://www.umn.ac.id) menyatakan bahwa UMN didirikan pada tanggal 25 November 2005 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 169/D/O/2005 yang operasional secara resmi dikelola oleh Yayasan Multimedia Nusantara. Yayasan ini didirikan oleh Kompas Gramedia, sebuah kelompok usaha terkemuka yang bergerak di bidang media massa, penerbitan, percetakan, toko buku, hotel, dan jasa pendidikan. Kelompok usaha yang tergabung dalam Kompas Gramedia antara lain: Koran *Kompas*, *Warta Kota*, *Kontan*, dan beberapa koran daerah, penerbit Gramedia Pustaka Utama, Elex Media Komputindo, majalah *Bobo*, *HAI*, *Nova*, *Chip*, *Infokomputer*, tabloid *Nova*, *Otomotif*, Toko Buku Gramedia, dan Jaringan Hotel Santika.

UMN didirikan atas prakarsa Dr. (HC) Jakob Oetama, perintis Kompas-Gramedia Group. Prakarsa Dr. (HC) Jakob Oetama atas pendirian UMN tersebut selanjutnya direalisasikan oleh jajaran pimpinan Kompas Gramedia Group, yaitu: Agung Adiprasetyo (CEO Kompas Gramedia), Teddy Suriyanto (*Business*

*Development*), jajaran *Board of Directors* Kompas Gramedia dan Panitia pendiri yang dipimpin Dr. Ir. P.M. Winarno, M.Kom. (Ketua) dan Ir. Budi Susanto, M.M. (Wakil Ketua). Selanjutnya tanggal 25 November 2005, izin operasional UMN diterbitkan oleh Menteri Pendidikan Nasional RI (Republik Indonesia) dan tanggal 20 November 2006, UMN secara resmi diluncurkan (*launching*) dalam sebuah acara di Hotel Santika dan diresmikan oleh Dr. Ir. Dodi Nandika Sekretaris Jendral Kementerian Pendidikan Nasional.

Sebelumnya UMN berkantor dan beroperasi di Gedung Wisma BNI 46 yang terletak di Jl. Jend. Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat. Selanjutnya, pada bulan Agustus 2008 pindah ke Plaza Summarecon Serpong. Hari bersejarah selanjutnya terjadi pada tanggal 5 September 2008, saat dilakukannya pemancangan tiang pertama yang menandai dimulainya pembangunan kompleks kampus UMN di tanah seluas 8 hektar yang terletak di daerah Gading Serpong, Tangerang. Mulai tahun ajaran 2009/2010, mahasiswa mulai menempati kampus baru yang terletak di kawasan Scientia Garden Summarecon yang beralamat di Jl. Boulevard Gading Serpong, Tangerang. Kampus UMN terdiri dari gedung rektorat (A) sebanyak 9 lantai, gedung perkuliahan (B) sebanyak 6 lantai, dan gedung perkuliahan (C) sebanyak 12 lantai. Peresmian kampus UMN oleh Menteri Pendidikan Nasional RI,

Prof. Dr. Ir. Mohammad Nuh, DEA, pada tanggal 2 Desember 2009.

Tanggal 25 Maret 2011, Dr. Ninok Leksono menggantikan Prof. Yohanes Surya, Ph.D. sebagai rektor Universitas Multimedia Nusantara. Selang 1 bulan kemudian yaitu tanggal 29 April 2011, Yayasan Multimedia Nusantara memulai pembangunan kampus tahap 2 yang berupa 5 menara bergaya *ecofriendly*. Setelah 5 tahun berdiri, UMN melaksanakan wisuda perdana yang diikuti oleh 75 orang wisudawan pada tanggal 16 November 2011. Wisudawan terdiri atas 6 mahasiswa akuntansi, 16 orang dari desain komunikasi visual, 25 orang dari ilmu komunikasi, 3 orang dari sistem informatika, 5 orang dari sistem komputer, 17 orang dari teknik informatika, dan 3 orang dari manajemen. UMN saat ini memiliki empat fakultas, yakni Fakultas Teknologi Informasi & Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi, Fakultas Seni & Desain, serta Fakultas Ekonomi.

### **2.1.2. Visi, Misi & Jasa yang Diberikan UMN**

Visi Universitas Multimedia Nusantara adalah menjadi perguruan tinggi unggulan di bidang *Information and Communication Technology (ICT)* baik di tingkat nasional maupun internasional yang menghasilkan lulusan berwawasan internasional dan

berkompetensi tinggi di bidangnya (berkeahlian) yang disertai jiwa wirausaha serta berbudi pekerti luhur.

Misi Universitas Multimedia Nusantara adalah turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan bangsa melalui upaya penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat), untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

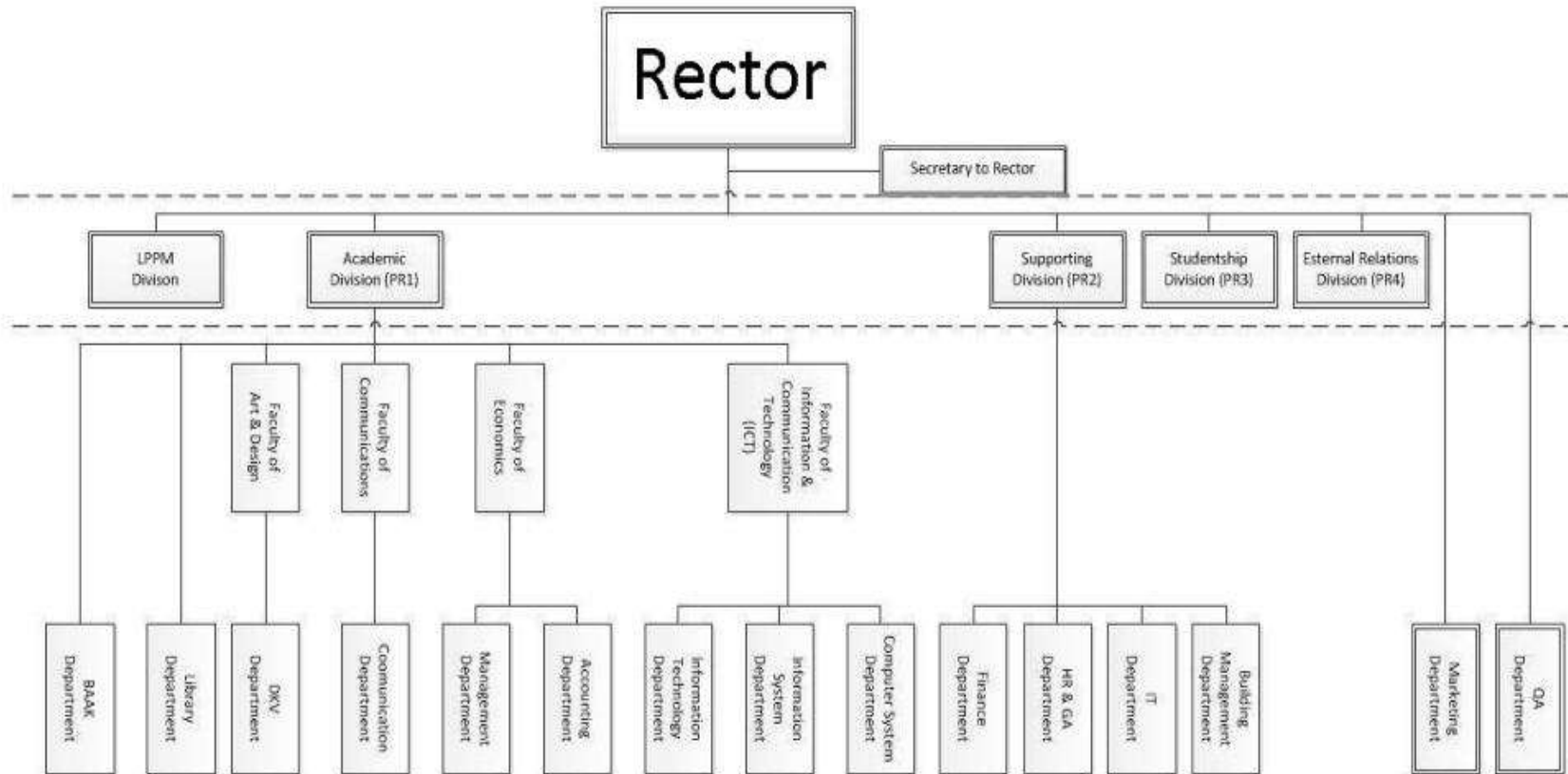
Jasa yang diberikan oleh Universitas Multimedia Nusantara adalah sebagai lembaga pendidikan tingkat Strata Satu Akuntansi, Manajemen, Teknologi Informatika, Sistem Komputer, Sistem Informatika, Ilmu Komunikasi, dan Desain Komunikasi Visual.

### **2.1.3. Struktur Organisasi UMN**

Berikut ini merupakan struktur organisasi di Universitas Multimedia Nusantara:



Gambar 2.1 Struktur Organisasi UMN



Sumber: HRD *Department*

Universitas Multimedia Nusantara (UMN) dipimpin oleh rektor yang bertugas untuk menentukan arah kebijakan Universitas. Rektor dalam menjalankan fungsi administrasi dibantu oleh *secretary to rector*.

Divisi UMN terdiri dari LPPM *division*, *Academic Division (PR1)*, *Supporting Division (PR2)*, *Studentship Division (PR3)*, *External Relations Division (PR4)* yang berkoordinasi dengan rektor yang memiliki tujuan untuk mendukung keberhasilan kebijakan UMN, rektor dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh 4 Pembantu Rektor (PR) dan LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat). LPPM *Division* yang bertugas untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat.

*Academic Division (PR1)* memiliki tugas mengkoordinasikan BAAK (Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan) *Department*, *Library Department*, dan Fakultas yang ada seperti *Faculty of Art & Design*, *Faculty of Communication*, *Faculty of Economics*, dan *Faculty of Information & Communication Technology (ICT)*. *Faculty of Art & Design* bertanggungjawab atas *DKV Department*, *Faculty of Communications* bertanggungjawab atas *Communication Department*, *Faculty of Economics* bertanggungjawab atas

*Management Department* dan *Accounting Department*, serta *Faculty of Information & Communication Technology (ICT)* bertanggungjawab atas *Information Technology Department*, *Computer System Department*, dan *Information System Department*.

*Supporting Division (PR2)* memiliki tugas memastikan departemen-departemen yang ada dibawahnya dapat berjalan baik dan lancar. Departemen yang ada terdiri dari *Finance Department*, *HR (Human Resources)*, & *GA (General Administration) Department*, *IT Department*, dan *Building Management Department*. *Studentship Division (PR3)* bertanggungjawab atas pusat karir, konseling, dan kemahasiswaan. Lalu ada *External Relations Division (PR4)* yang memiliki tugas dalam membina hubungan dengan pihak eksternal dalam rangka kerja sama universitas.

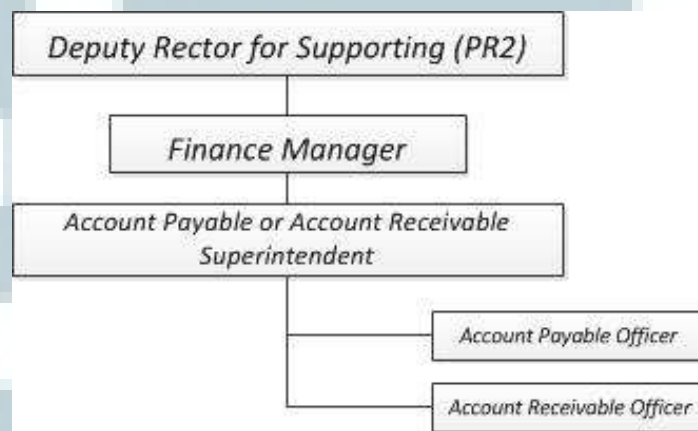
Departemen UMN terdiri dari *marketing department* dan *QA (Quality Assurance) department* yang arah pertanggungjawabannya kepada Rektor, *Marketing department* memiliki tugas untuk mempromosikan, mengenalkan UMN, menciptakan *brand awareness*, mendapatkan mahasiswa baru UMN, *QA Department* bertugas untuk menjamin agar *Standard Operational Procedure (SOP)* terlaksana dan terdokumentasikan.



Pada kerja magang, penulis bekerja di *finance department*. Penulis ditempatkan untuk membantu pekerjaan *account payable officer*.

### ***Finance Department Universitas Multimedia Nusantara***

**Gambar 2.2 Struktur *Finance Department* UMN**



Sumber: HRD *Department*

*Account payable officer* bertugas untuk melakukan pembayaran secara operasional yang digunakan untuk pembiayaan-pembiayaan terkait bidang akademik, *dormitory*, marketing, serta umum & administrasi. Pengeluaran di *dormitory* untuk memenuhi kebutuhan yang ada seperti perbaikan jendela. Pengeluaran marketing untuk pembayaran promosi seperti memasang iklan di majalah, radio, *facebook*, dan spanduk. Bagian umum & administrasi, pengeluaran ditujukan untuk membayar Sumber Daya Manusia (SDM), serta pembelian alat tulis kantor.

## **2.2. Kantor Akuntan Publik Hertanto, Sidik, & Rekan**

### **2.2.1. Sejarah Singkat KAP Hertanto, Sidik, & Rekan**

Kantor akuntan publik ini didirikan untuk pertama kali pada tahun 1982 oleh sekelompok orang yang telah memiliki pengalaman profesional dalam melaksanakan penugasan audit dan memberikan jasa konsultasi pada berbagai perusahaan baik swasta maupun BUMN. Pada awal pendiriannya, bernama KAP Drs Hertanto, sejalan dengan berlalunya waktu telah dilakukan perubahan diantaranya dengan Akta No. 5 dari Notaris Negeri Sirait Sh., MH, tanggal 7 Agustus 2003, tentang Perubahan Nama menjadi KAP Hertanto, Djoko, Ikah, Sutrisno.

Sesuai dengan berubahnya dinamika untuk mengantisipasi perkembangan dunia yang menuju kepada arah globalisasi dalam semua hal, telah dilakukan perubahan kembali anggaran dasar sesuai dengan Akta No. 17, tanggal 31 Juli 2008 dari notaris yang sama, yaitu mengubah nama menjadi KAP Hertanto, Sidik, & Rekan, dan perubahan akta No. 3, tanggal 9 Oktober 2009 dari notaris yang sama, dilakukan perubahan Pimpinan Rekan, dan Akta Perubahan No. 3, tanggal 4 April 2012 dari Notaris yang sama tentang perubahan susunan rekan. Ijin melaksanakan aktivitas untuk melakukan praktik dalam memberikan jasanya telah diperbaharui sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 682/KM.1/2008, tanggal 16 Oktober 2008, tentang

Pemberian Ijin Usaha Kantor Akuntan Publik Hertanto, Sidik, & Rekan dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 421/KM.1/2009, tanggal 23 April 2009, tentang Pemberian Ijin Pembukaan Cabang Kantor Akuntan Publik Hertanto, Sidik, & Rekan yang terletak di Gedung Graha Mandiri Jl. Imam Bonjol No. 61 lt. 19, Jakarta Pusat 10310.

Dalam perkembangannya, KAP Hertanto, Sidik, dan Rekan telah menjadi *member* pada Polaris Internasional sejak bulan Desember tahun 1990 s.d. 7 Juni 2012 yang berkedudukan di 9200-*South Dadeland Boulevard Suite 510 Miami, Florida 3316 USA* yang memiliki jaringan pada 80 negara dan pada tanggal 8 Juni 2013 namanya berubah menjadi *IGAF Polaris*. Selanjutnya pencantuman namanya telah mendapat persetujuan dari Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan Republik Indonesia No. S-407/MK.I/2012, tanggal 8 Juni 2012 dan Surat Terdaftar Organisasi Audit Asing (OAA).

Berdasarkan Akta No. 2, pernyataan Keputusan Para *Partner* Persekutuan (*Partnership*) “Hertanto, Sidik, & Rekan”, tanggal 2 Juli 2013, dilakukan perubahan nama persekutuan dari Kantor Akuntan Publik Hertanto, Sidik, & Rekan menjadi Kantor Akuntan Publik Hertanto, Sidik, & Indra. Dengan adanya perubahan nama kantor tersebut, tidak ada perubahan susunan dan jumlah rekan (*Partner*) juga para praktisi (profesional) lainnya

yang tergabung dalam kantor akuntan publik ini yang diharapkan semakin mampu berkiprah di bidangnya.

### 2.2.2. Visi, Misi, & Jasa yang Diberikan

#### VISI

Visi yang dibawa adalah untuk menjadi entitas (persekutuan) jasa yang profesional dan terpercaya yang eksis dalam percaturan bisnis nasional maupun internasional, serta menyediakan jasa keuangan dan bisnis dalam mata rantai internasional.

Selain itu, menjadi salah satu kantor akuntan publik yang mempunyai reputasi baik, berintegritas tinggi, profesional, serta memiliki independensi yang dapat diandalkan dalam menjalankan penugasannya sehingga bermanfaat bagi para pengguna jasa dengan senantiasa mengacu kepada :

1. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia yang kini telah konvergen dengan *International Financial Reporting Standard / International Accounting Standard (IFRS/IAS)*; serta
2. Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) "terkini" yang saat ini juga telah mengacu kepada *International Auditing Standard (IAS)* yang dikeluarkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI).

## MISI

Adapun yang menjadi misi dalam menjalankan profesi sebagai kantor akuntan publik adalah sebagai berikut:

1. Turut berpartisipasi dalam membangun negara melalui jalur “praktisi” (profesi) dan indenpendensi pada kantor akuntan publik dengan menerapkan ketentuan dan aturan yang berlaku sehingga dapat diterima oleh semua pihak
2. Memberikan jasa dengan kualitas (gugus kendali mutu) yang terbaik kepada pelanggan (klien), sehingga bermanfaat bagi para pengguna (*stakeholder*)
3. Mengutamakan kepuasan pelanggan, meningkatkan kompetisi secara berkelanjutan dan melakukan inovasi jasa profesi berkelanjutan
4. Memperluas jaringan melalui *strategic partner* atau melakukan kerjasama dengan yang sejenisnya

Layanan jasa yang diberikan oleh divisi audit diantaranya berupa:

1. Audit umum, yaitu melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan perusahaan berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dengan tujuan memberikan pendapat Laporan Audit Independen (LAI) atas kewajaran laporan keuangan entitas sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), Standar Akuntansi Keuangan-Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) atau basis akuntansi

komprensif lainnya di Indonesia yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.

2. Audit Investigasi, yaitu bertujuan untuk melakukan investigasi terhadap kemungkinan ada/tidaknya kecurangan (*fraud*) yang terjadi di entitas yang diperiksa dengan mempersiapkan dokumen pendukung yang diperlukan dalam pengusutan penyelewengan oleh pihak kejaksaan ataupun pihak yang berwajib
3. Audit Kepatuhan, yaitu merupakan jasa yang diberikan untuk membantu *stakeholder* dalam melakukan identifikasi apakah entitas usaha ataupun suatu organisasi telah mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Pengendalian Intern yang baik, serta ketentuan yang berlaku pada organisasi sektor publik.
4. Audit Kinerja, yaitu bertujuan untuk mengetahui efektivitas entitas dan efisiensi yang telah dilakukan dalam menjalankan operasional perusahaan yang dipercayakan oleh *owners* dan *stakeholders*, sehingga dapat menilai *performance* entitas secara akurat.
5. Audit Intern, yaitu dilakukan guna membantu pihak manajemen entitas dalam mengawasi aktivitas masing-masing bagian atau unit bisnis di lingkungan entitas.

6. *Due Dilligence*, yaitu melakukan uji-tuntas atau pengujian secara mendalam atas akurasi data yang disajikan yang meliputi data keuangan, legalitas dan data operasional, serta menentukan kewajaran atas pencantumannya dalam laporan keuangan.
7. *Review Anggaran*, yaitu jasa yang diberikan dalam rangka membantu untuk melakukan penelaahan dan review dalam menyusun anggaran secara akurat, memberikan petunjuk (*guidance*), melakukan pengawasan dan melakukan analisis terhadap pelaksanaannya, serta memberikan rekomendasi perbaikan untuk penyusunan anggaran periode berikutnya.
8. *Review* atas Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN, yaitu melakukan review terhadap penilaian tingkat kesehatan BUMN yang telah dilakukan oleh manajemen berdasarkan Keputusan Menteri Negara BUMN R.I. No. KEP. 100/MBU/2002, tanggal 4 Juni 2002.
9. *Review* atas Penilaian *Key Performance Indicator* (KPI) BUMN, yaitu melakukan review terhadap penilaian KPI untuk suatu BUMN yang telah dilakukan oleh manajemen berdasarkan komitmen Direksi yang telah ditetapkan oleh Pemegang Saham pada saat persetujuan RKAP BUMN
10. *Atestasi*, yaitu jasa yang diberikan mengacu pada prosedur pemeriksaan yang disepakati, sehingga dapat memberikan

suatu simpulan atas kehandalan pernyataan yang dibuat oleh pihak lain diantaranya menilai efektifitas pengendalian internal, ketaatan debitur atas ketentuan perjanjian kredit yang telah disepakati dan restrukturisasi pinjaman, serta *review* terhadap ‘Satuan Kerja Audit Intern’ (SKAI) yang disyaratkan oleh Bank Indonesia.

11. Kompilasi, yaitu jasa yang diberikan dalam rangka membantu pengguna jasa untuk menyusun laporan keuangan yang memenuhi standar pelaporan mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dan Prinsip Akuntansi yang Berterima Umum juga termasuk diantaranya Laporan Keuangan Daerah.

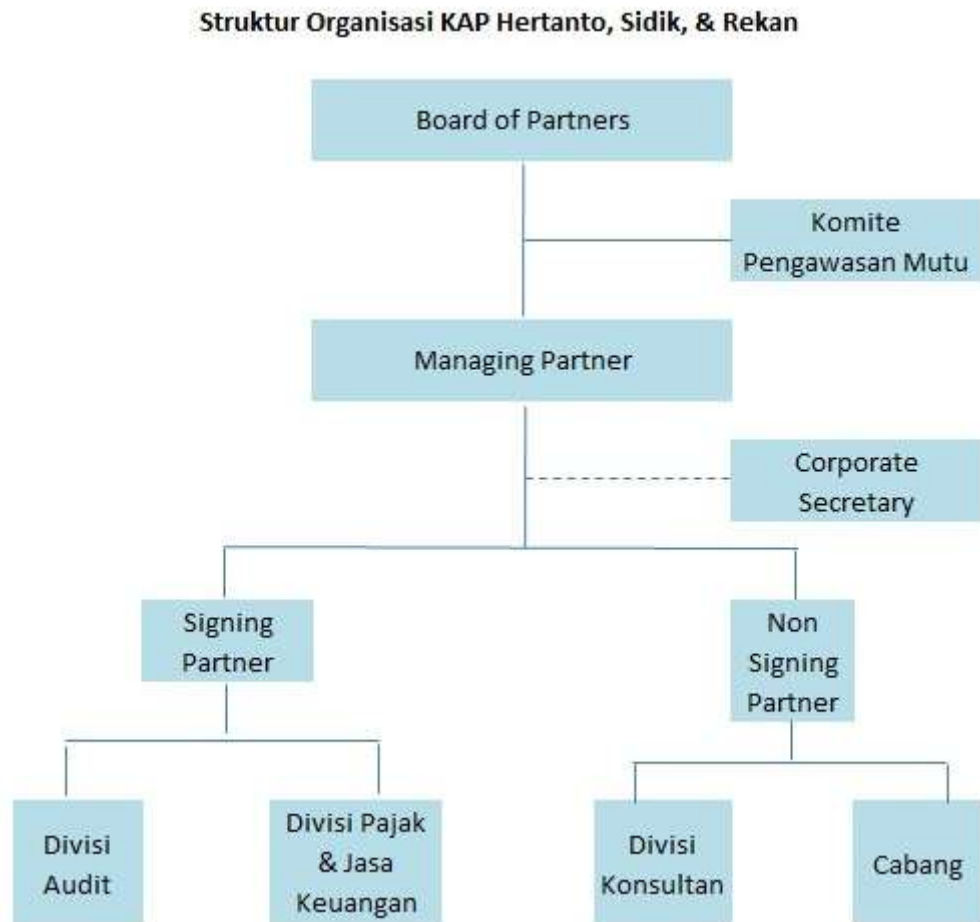
### **2.2.3. Struktur Organisasi KAP Hertanto, Sidik, & Rekan**

Berikut ini merupakan struktur organisasi Kantor Akuntan Publik Hertanto, Sidik, & Rekan:

UMMN



**Gambar 2.3 Struktur Organisasi KAP Hertanto, Sidik, & Rekan**



Sumber: HSR (2013)

Berikut ini adalah penjelasan dari bagian dalam struktur organisasi tersebut:

1. *Board of Partner*, bertanggung jawab penuh atas kegiatan kantor akuntan publik serta memimpin pelaksanaan pekerjaan audit dan konsultasi.
2. *Managing Partner*, membentuk tim kerja lapangan untuk setiap perikatan dan menetapkan *rate* honorarium tim kerja lapangan.

3. *Signing partner, partner* yang bertugas untuk memberikan otorisasi hasil audit termasuk melakukan *review* kembali atas kertas kerja
4. *Corporate secretary*, mengurus surat menyurat dan membantu manajemen dalam menyelesaikan masalah di bidang kesekretariatan dan rumah tangga kantor
5. Staf dalam divisi audit terdiri dari:
  1. Auditor Senior, melaksanakan audit, mengusahakan biaya audit dan waktu audit sesuai dengan rencana, serta bertugas untuk mengarahkan dan *me-review* pekerjaan auditor junior
  2. Auditor Junior, melaksanakan prosedur audit rinci dan membuat kertas kerja untuk mendokumentasikan pekerjaan audit yang telah dilaksanakan

Pada saat kerja magang, penulis bekerja di divisi audit. ditempatkan sebagai auditor junior untuk membantu auditor senior dalam melaksanakan jasa audit.

## **2.3. PT Pertamina (Persero)**

### **2.3.1. Sejarah Singkat PT Pertamina (Persero)**

Tonggak-tonggak sejarah berdirinya PT Pertamina (Persero) sebagai Perusahaan BUMN sejak tahun 1957 hingga berubah status

hukum menjadi Perusahaan Perseroan Terbatas (Persero) adalah sebagai berikut:

### **1957**

Pada 1950-an, ketika penyelenggaraan negara mulai berjalan normal se usai perang mempertahankan kemerdekaan, pemerintah Republik Indonesia mulai menginventarisasi sumber-sumber pendapatan negara, di antaranya dari minyak dan gas. Namun saat itu, pengelolaan ladang-ladang minyak peninggalan Belanda terlihat tidak terkendali dan penuh dengan sengketa. Di Sumatera Utara misalnya, banyak perusahaan-perusahaan kecil saling berebut untuk menguasai ladang-ladang tersebut.

### **1968**

Pada tahun 1960, PT PERMINA direstrukturisasi menjadi PN PERMINA sebagai tindak lanjut dari kebijakan Pemerintah, bahwa pihak yang berhak melakukan eksplorasi minyak dan gas di Indonesia adalah negara. Melalui satu Peraturan Pemerintah yang dikeluarkan Presiden pada 20 Agustus 1968, PN PERMINA yang bergerak di bidang produksi digabung dengan PN PERTAMIN yang bergerak di bidang pemasaran guna menyatukan tenaga, modal dan sumber daya yang kala itu sangat terbatas. Perusahaan gabungan tersebut dinamakan PN Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Nasional (Pertamina).

## **1971**

Untuk memperkokoh perusahaan yang masih muda ini, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang No. 8 tahun 1971, dimana di dalamnya mengatur peran Pertamina sebagai satu-satunya perusahaan milik negara yang ditugaskan melaksanakan pengusahaan migas mulai dari mengelola dan menghasilkan migas dari ladang-ladang minyak di seluruh wilayah Indonesia, mengolahnya menjadi berbagai produk dan menyediakan serta melayani kebutuhan bahan bakar minyak & gas di seluruh Indonesia.

## **2001**

Seiring dengan waktu, menghadapi dinamika perubahan di industri minyak dan gas nasional maupun global, Pemerintah menerapkan Undang-Undang No. 22/2001. Paska penerapan tersebut, Pertamina memiliki kedudukan yang sama dengan perusahaan minyak lainnya. Penyelenggaraan kegiatan bisnis PSO tersebut akan diserahkan kepada mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan dengan penetapan harga sesuai yang berlaku di pasar.

## **2003**

Pada 17 September 2003 Pertamina berubah bentuk menjadi PT Pertamina (Persero) berdasarkan PP No. 31/2003.

Undang-Undang tersebut antara lain juga mengharuskan pemisahan antara kegiatan usaha migas di sisi hilir dan hulu

### **2005**

Pada 10 Desember 2005, sebagai bagian dari upaya menghadapi persaingan bisnis, PT Pertamina mengubah logo dari lambang kuda laut menjadi anak panah dengan tiga warna dasar hijau-biru-merah. Logo tersebut menunjukkan unsur kedinamisan serta mengisyaratkan wawasan lingkungan yang diterapkan dalam aktivitas usaha Perseroan.

### **2006**

Selanjutnya pada 20 Juli 2006, PT Pertamina mencanangkan program transformasi perusahaan dengan 2 tema besar yakni fundamental dan bisnis. Untuk lebih memantapkan program transformasi itu, pada 10 Desember 2007 PT Pertamina mengubah visi perusahaan yaitu, “Menjadi Perusahaan Minyak Nasional Kelas Dunia”. Menyikapi perkembangan global yang berlaku, Pertamina mengupayakan perluasan bidang usaha dari minyak dan gas menuju ke arah pengembangan energi baru dan terbarukan, berlandaskan hal tersebut di tahun 2012 Pertamina menetapkan visi baru perusahaannya yaitu, “Menjadi Perusahaan Energi Nasional Kelas Dunia”.